



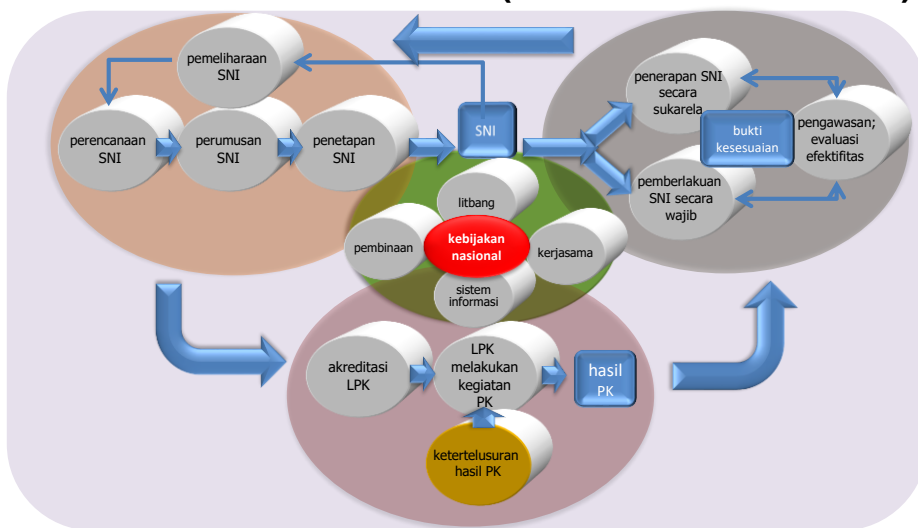
Kebijakan Pengembangan SNI

Disampaikan pada:
Workshop Peningkatan Kompetensi SDM dalam rangka
Perumusan SNI

Pusat Perumusan Standar BSN
2 Mei 2018



STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN - SPK (UU No. 20 Tahun 2014)





TUJUAN SPK

- ✓ Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha serta kemampuan inovasi teknologi;
- ✓ Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- ✓ Meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensinya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

(UU 20/2014, Pasal 3)



KEBIJAKAN NASIONAL STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

- ✿ Disusun oleh BSN berdasarkan rencana pembangunan nasional (**pasal 5, ayat 3**).
- ✿ wajib menjadi acuan bagi kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di setiap sektor (**pasal 7**).





TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERUMUSAN SNI



- Percepatan pelaksanaan perumusan SNI
- Penguatan monitoring setiap tahapan perumusan SNI
- Mendukung sinergitas kebutuhan industri dengan program pemerintah
- Mengidentifikasi LPK potensial sejak SNI akan dirumuskan

5



PEDOMAN BARU TAHUN 2018

Sudah Terbit	Dalam Proses SK
<ul style="list-style-type: none"> ⑩ Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (PBSN No.1 Th 2018) ⑩ Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional Menjadi SNI (PBSN No.2 Th 2018) ⑩ Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan SNI (PBSN No.3 Th 2018) • Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI (PBSN No.4 Th 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penulisan SNI • Kaji Ulang





**PEMENUHAN KETENTUAN WTO:
HARMONISASI STANDAR NASIONAL DENGAN STANDAR
INTERNASIONAL**

**CODE OF GOOD PRACTICE FOR THE
PREPARATION, ADOPTION AND
APPLICATION OF STANDARDS
(Annex 3 Agreement on TBT-WTO)**



**Kebijakan
harmonisasi
dalam
perumusan
SNI**

- Jika sudah ada standar internasional yang telah ditetapkan atau hampir ditetapkan, standar nasional yang sedang atau akan dirumuskan harus harmonis dengan standar internasional tersebut
- Dibutuhkan standar nasional, karena standar internasional yang ada dianggap tidak efektif karena alasan iklim, geografis, atau alasan teknologi
- Menambahkan National Differences dalam standar nasional sepanjang dapat memenuhi kaidah "scientific evidence"

7



Perumusan SNI menurut UU 20/2014

Perumusan SNI memperhatikan **waktu penyelesaian yang efektif dan efisien (pasal 12, ayat 2)**

SNI dirumuskan memperhatikan ketersediaan **sumber daya, kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi, dan/atau pengalaman (Pasal 13, ayat 1)**

Dalam hal **terdapat standar internasional**, SNI dirumuskan **selaras dengan standar internasional** melalui:

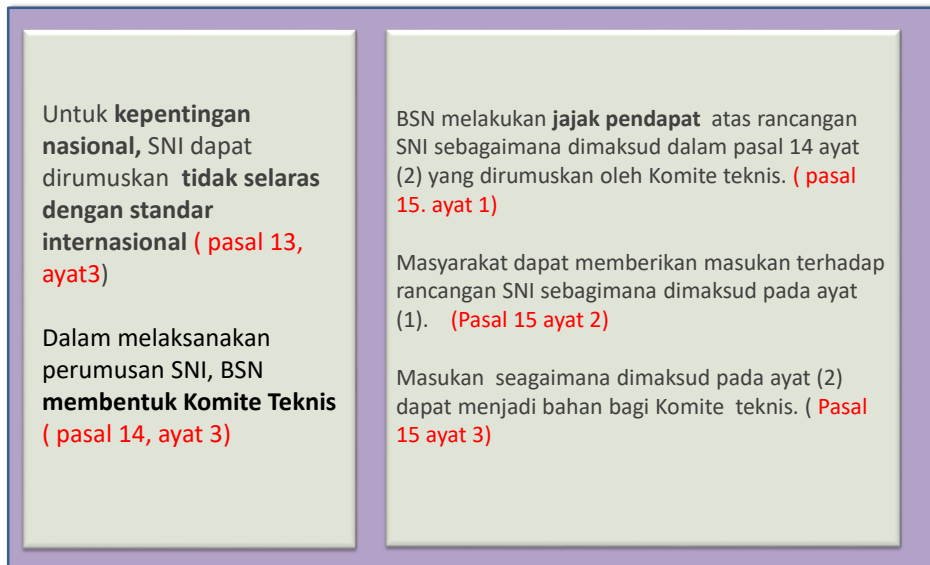
- a) adopsi standar internasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menghadapi perdagangan global; atau
- b) modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain
(Pasal 13 Ayat 2)

8





Perumusan SNI menurut UU 20/2014



9



KOMITE TEKNIS/SUB KOMTEK PERUMUSAN SNI: PEMENUHAN KETERWAKILAN UNSUR PEMANGKU KEPENTINGAN



CATATAN:

Jumlah keanggotaan Komtek minimal 9 orang dan maksimal 15 orang (ganjil)
Jumlah salah satu unsur pemangku kepentingan tidak boleh melebihi 50 %

10





KOMITE TEKNIS PERUMUSAN SNI

Bidang	Kom-tek	Sekretariat di BSN	Sekretariat di K/L	Jumlah K/L (Es.II)	Struktur Organisasi		Keterangan
					Ada unit standardisasi	Tidak ada	
LS	33	8	25	17	6	11	Pustanling KLHK, PSI Kemenperin, PSJM BATAN, SDPPI Kominfo, Ditstandag, BSN
MEK	44	6	38	14	2	12	PSI Kemenperin, BSN
PPK	45	18	27	11	4	7	Pustanling KLHK, PSI Kemenperin, PSJM BATAN, BSN
KP	23	1	22	6	2	4	PSI Kemenperin, BSN
	145	33	112				

11



SNI Dalam Angka

No	SNI Per Sektor	SNI Berlaku	SNI Abolisi/ Tidak berlaku	Total SNI Yang Pernah Ditetapkan
1	Pertanian dan teknologi pangan	1.985	437	2.422
2	Konstruksi	865	180	1.045
3	Elektronik, teknologi informasi dan komunikasi	418	4	422
4	Teknologi perekayasaan	1.536	282	1.818
5	Umum, infrastruktur dan ilmu pengetahuan	642	60	702
6	Kesehatan, keselamatan dan lingkungan	815	128	943
7	Teknologi bahan	2.734	546	3.280
8	Teknologi khusus	256	68	324
9	Transportasi dan distribusi pangan	508	206	714
Jumlah		9.759	1.911	11.670

*per Januari 2018



Melindungi masyarakat



Penguatan Daya Saing Produk



Mendukung inovasi



Harmonisasi dengan standar internasional

12





SNI UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT

SNI
SNI WAJIB

No	Instansi Teknis yang Memberlakukan SNI Secara Wajib	Jumlah SNI
1.	Kementerian Perindustrian	105
2.	Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral	27
3.	Kementerian Pertanian	3
4.	BPOM	1
5.	Kementerian Perhubungan	14
6.	Kementerian Pekerjaan Umum	55
7.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2
Total		207



13



KETELUSURAN DENGAN SISTEM INTERNASIONAL: AKREDITASI DAN SALING PENGAKUAN ANTAR NEGARA

KEANGGOTAAN MLA/MRA KAN

MRA



MLA



1. Laboratorium Penguji
2. Laboratorium Kalibrasi
3. Lembaga Inspeksi
4. Laboratorium Medik



1. Penyelenggara Uji Profisiensi (PTP)



1. Lembaga Sertifikasi SM
2. Lembaga Sertifikasi SML
3. Lembaga Sertifikasi Produk
4. Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan



1. Lembaga Sertifikasi Personel
2. Lembaga Sertifikasi SM Keamanan Informasi
3. Lembaga Sertifikasi SM Energi



14



LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK) YANG DIAKREDITASI OLEH KAN

Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

No	LPK	Jumlah
1	Laboratorium Penguji	1187
2	Laboratorium Kalibrasi	252
3	Lembaga Inspeksi	119
4	Penyelenggara Uji Profisiensi	15
5	Laboratorium Medik	59
Jumlah		1632



15

Lembaga Sertifikasi

No	LPK	Jumlah
1	Lembaga Sertifikasi Produk	59
2	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	15
3	Lembaga Sertifikasi HACCP	8
4	Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2
5	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	40
6	Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan	8
7	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	25
8	Lembaga Sertifikasi Personel	11
9	Lembaga Sertifikasi Pangan Organik	8
10	Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produk Lestari	13
11	Lembaga Seretifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	2
12	Lembaga Verifikasi/Validasi Gas Rumah Kaca	2
13	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	49
14	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Pencucian	1



Perkembangan Standardisasi Internasional

16





Sidang Plenary ke - 5 ISO/TC 292 *Security and resilience*

- Tanggal 12-16 Maret 2018, Sydney-Australia
- **Salah satu keputusannya : Standar**
“Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system” yang diusulkan oleh Indonesia, disetujui untuk menjadi standar ISO 22327



Sidang APEC SCSC 1

26-27 February 2018, PNG

Indonesia juga melaksanakan pertemuan bilateral dengan delegasi Jepang dan delegasi Korea.

Membahas:

- Rencana *“Workshops for Multilateral Climate Actions by Use of ISO 14080 (Greenhouse Gas Management): Mitigation within APEC Region”* pada September 2018 di Jakarta.
- Jepang juga menyampaikan rencana program e-learning dan sertifikasi terhadap tenaga profesional muda di bidang “quality control” di perusahaan.
- Korea mengajak beberapa anggota ekonomi APEC dan mengajak para ahli di regional Asia untuk membuat suatu forum regional yang menyamakan persepsi dalam mengembangkan standar/guidelines /persyaratan “Smart City” di regional Asia.





Komite ISO yg dibentuk pada tahun 2017 s/d 11 April 2018

Referensi	Judul	Status/Posisi Indonesia
ISO/TC 283	Occupational health and safety management	Mendukung & sebagai P-member
ISO/PC 318	Community scale resource oriented sanitation treatment systems	Sebagai O-member
ISO/PC 317	Consumer protection: Privacy by design for consumer goods and services	??
ISO/PC 316	Water efficient products – Banding	??
ISO/PC 315	Indirect, temperature – controlled refrigerated delivery services - land transport of parcels with intermediate transfer	Mendukung & sebagai P-member
ISO/TC 314	Ageing societies	??
ISO/TC 313	Packaging machinery	??
ISO/TC 312	Excellence in service	??
ISO/PC 311	Vulnerable consumers	Mendukung & sebagai P-member



Isu-isu terbaru yang sedang di-ballot di ISO (1)

Referensi	Closed ballot	Ruang Lingkup
TS/P 271 - Musical instruments	12 Mei 2018	Standardization in the field of musical instruments including: standardization of classification, terminology, products, safe use, test methods and conformity assessment rules.
TMB/NP Guidelines on Integrating a Business Excellence Framework (GIBEF) with ISO management system standards (2018)	19 Mei 2018	Organizations implementing single or multiple management systems and simultaneously the Business Excellence framework are faced with the major challenge of lack of alignment. This can be attributed to multiple factors, including but not limited to, organizational design/structure, responsibilities matrix, contextual understanding of the linkages/inter-dependencies, silo mentality and turf protection. “Guidelines on Integrating a Business Excellence Framework with ISO management system standards” will provide the roadmap on integrating the national/international business excellence frameworks with management system standards for enhancing organizational efficiency, facilitating effective decision-making, and promoting transparency, innovation and continuous improvement.

BSN Isu-isu terbaru yang sedang di-*ballot* di ISO (2)

Referensi	Closed ballot	Ruang Lingkup
TS/P 272 - Karst	23 Mei 2018	Standardization in the field of karst terminology, sustainable development of karst resources, environmental protection and management of karst environment, as well as investigation and assessment (including modeling methods and mapping of karst systems).
TS/P 273 - Transaction assurance in E-commerce	1 Juni 2018	Standardization in the field of "transaction assurance and upstream/downstream directly related processes in e-commerce", including the following: <ul style="list-style-type: none"> • The assurance of transaction process in e-commerce (including easier access to e-platforms and e-stores); • The protection of online consumer rights including both prevention of online disputes and resolution process; • The interoperability and admissibility of commodity quality inspection result in cross-border e-commerce. • The assurance of e-commerce delivery to the final consumer.

21



BSN Isu-isu terbaru yang sedang di-*ballot* di ISO (2)

Referensi	Closed ballot	Ruang Lingkup
TMB/NP on Glass clarity	6 Juni 2018	The proposed International Standard will establish requirements for the use of the designations "clear glass" and "ultra-clear glass" for non-coloured glass according to their clarity and iron content. The standard will specify a procedure for measuring the clarity of glass items by means of a spectrophotometer. The standard will cover mineral glass, and glass in items where the glass component is not covered by coating or decoration, and is therefore accessible for sampling. The scope of this International Standard includes glass used as tableware, giftware, jewellery and luminaries. It excludes glass used in construction work, containers, medicine and laboratories, or in other types of technical applications.

22



BSN Komite IEC yg dibentuk pada tahun 2017 (1)

Referensi	Judul / Brief Scope	Status/Posisi Indonesia
SC 8B	<p>Decentralized Electrical Energy Systems</p> <p>Standards enabling the development of secure, reliable and cost-effective systems with decentralized management for electrical energy supply, alternative/complement/precursor to traditional large interconnected and highly centralized systems. The most popular concept is currently the “microgrid” defined as a group of interconnected loads and distributed energy resources with defined electrical boundaries that acts as a single controllable entity and is able to operate in both grid-connected and island mode. Decentralized energy systems have applications for developing countries (focussing on access to electricity) as well as for developed countries (focussing on high reliability, black-out recovery and/or services). Interactions within Decentralized (Multi) Energy Systems should also be considered.</p>	??

BSN Komite IEC yg dibentuk pada tahun 2017 (2)

Referensi	Judul / Brief Scope	Status/Posisi Indonesia
TC 124	<p>Wearable electronic devices and technologies</p> <p>Standardization in the field of wearable electronic devices and technologies which include patchable materials and devices, implantable materials and devices, ingestible materials and devices, and electronic textile materials and devices.</p>	??
SyC LVDC	<p>Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access</p> <p>Standardization in the field of Low Voltage Direct Current (hereinafter referred to as LVDC) in order to provide systems level standardization, coordination and guidance in the areas of LVDC and LVDC for Electricity Access.</p> <p>To widely consult within the IEC community and the broader stakeholder community to provide overall systems level value, support and guidance to the TCs and other standards development groups, both inside and outside the IEC.</p> <p>To bring urgency to development of standards for Electricity Access enabling inclusive development of all communities.</p>	??

BSN Komite IEC yg dibentuk pada tahun 2017 (3)

Referensi	Judul / Brief Scope	Status/Posisi Indonesia
SyC Smart Cities	<p>Electrotechnical aspects of Smart Cities</p> <p>To foster the development of standards in the field of electrotechnology to help with the integration, interoperability and effectiveness of city systems.</p> <p>Note 1 This will be done:</p> <ul style="list-style-type: none"> - by promoting the collaboration and systems thinking between IEC/TCs, the SyC and other SDOs in relation to city system standards; - by undertaking systems analysis to understand the needs for standards and assess new work item proposals (NWIPs) related to city systems; - by developing systems standards where needed and by providing recommendations to existing SyCs, TCs/SCs and other SDOs. <p>Note 2: Overall common city goals include, for example, sustainable development, efficiency, resilience, safety and support for citizens' engagement and participation. However, an individual city will follow its own approach.</p> <p>Note 3: "Cities" refers to any geographically located population.</p>	??
ISO/IEC JTC 1/SC 42	Artificial Intelligence	??

25

BSN
Komite Akreditasi Nasional

Perkembangan SNSU di Indonesia

26



Kepala BSN Resmikan Laboratorium SNSU

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya meresmikan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang menggunakan gedung Technology Business Incubation Center (TBIC) yang berlokasi di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat pada Senin (19/2/2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 43, diamanatkan bahwa pengelolaan SNSU dilakukan oleh BSN.

Laboratorium yang diresmikan ialah Laboratorium SNSU Bidang Mikrobiologi dan Peralatan Kesehatan, pada tahun 2017 BSN melakukan pengadaan peralatan analisa biologi molekuler berupa Polymerase chain reaction (PCR) dan peralatan penunjangnya untuk analisa molekuler DNA. Tujuannya untuk menyediakan ketertelusuran pengukuran di bidang biologi.

TERIMA KASIH THANK YOU



Members of



www.bsn.go.id



Members of



www.kan.or.id

28